



KOORDINASI DAN SUPERVISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI

Makassar, 11 Oktober 2017





Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. **Pasal 3**

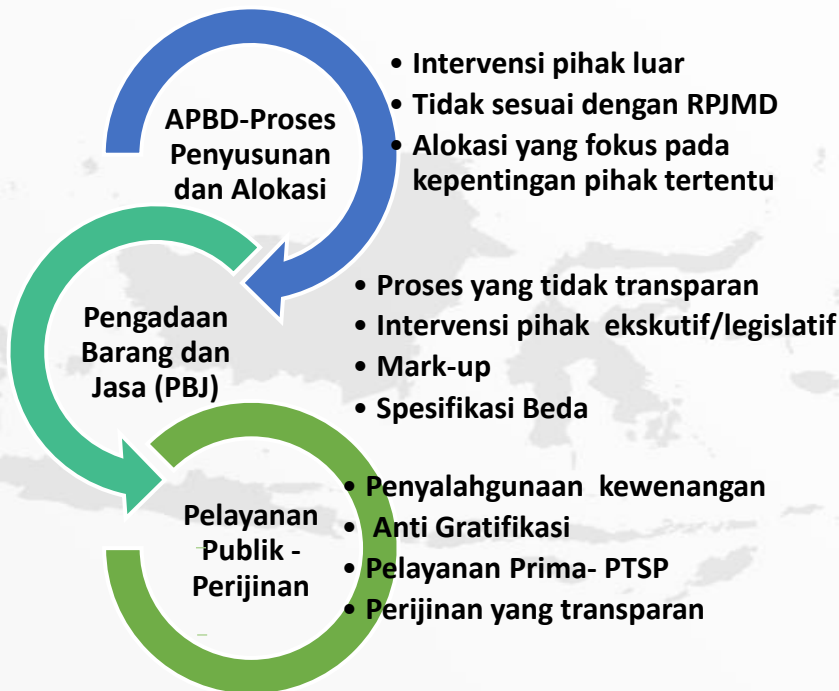
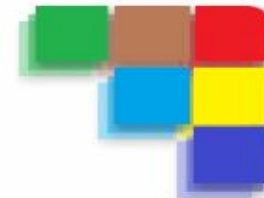


- *networking* → *counterpartner*
- **tidak memonopoli** tugas dan wewenang lid-dik-tut;
- *trigger mechanism*

2



AREA POTENSI KORUPSI DI PEMERINTAH DAERAH





199 orang (32,3%)

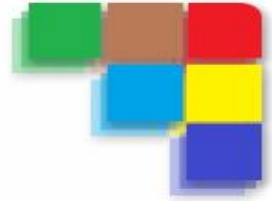
dari 616 Pelaku Korupsi yang ditangani KPK
adalah kader politik

(Anggota DPR/DPRD, Kepala Daerah & Kepala Lembaga)

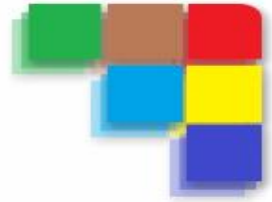
30 Juni 2017

KEGIATAN KORSUPGAH

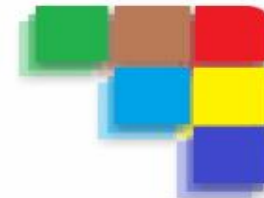




1. Melaksanakan Proses Perencanaan & Penganggaran APBD melalui implementasi *e-planning* yang terintegrasi dengan *e-budgeting*
2. Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa berbasis elektronik termasuk pendirian Unit Layanan Pengadaan (ULP) mandiri dan penggunaan *e-procurement*
3. Melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan proses penerbitan perijinan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang transparan dan jelas dengan mengoptimalkan teknologi informasi
4. Melaksanakan penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang kompeten dan independen dengan didukung oleh SDM dan anggaran pengawasan yang memadai
5. Melaksanakan perbaikan manajemen ASN/PNS dan penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja



6. Melakukan pembaruan peraturan LHKPN dan membentuk Unit Pengelola LHKPN serta membangun Sistem Pengendalian Gratifikasi dan membentuk Unit Pengendali Gratifikasi
7. Melaksanakan perbaikan manajemen aset daerah dan optimalisasi pendapatan asli daerah dengan didukung sistem, prosedur, dan aplikasi yang transparan dan akuntabel
8. Melaksanakan tata kelola Dana Desa termasuk pemanfaatan yang efektif dan akuntabel
9. Membangun sinergitas dan partisipasi seluruh komponen masyarakat terhadap penguatan tata kelola pemerintahan
10. Melaksanakan Rencana Aksi dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan



HASIL MONEV DAN REKOMENDASI





TOPIK	HASIL MONEV	REKOMENDASI
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	<ul style="list-style-type: none"> Sebagian besar Pemda sudah memiliki SSH namun belum ada ASB <i>E-Planning</i> belum terintegrasi dengan <i>E-Budgeting</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala Daerah ttg SSH dan ASB Memastikan SSH dan ASB ada di dalam aplikasi e-planning dan e-budgeting Mengintegrasikan <i>e-planning</i> dan <i>e-budgeting</i> Tahun 2018 sudah menggunakan <i>e-planning</i> yang terintegrasi dengan <i>e-budgeting</i>
PERIZINAN	<ul style="list-style-type: none"> Belum semua Pemda melimpahkan perizinan kepada DPMPSTSP Belum semua Pemda memiliki perizinan <i>online</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Daerah segera mengeluarkan Peraturan ttg Pelimpahan seluruh perizinan kepada PTSP Membangun aplikasi perizinan yang dilengkapi fitur <i>tracking</i> izin Menginformasikan nama & jenis perizinan, syarat, waktu dan mekanisme, biaya perizinan dalam website PTSP Tim Teknis sudah ditempatkan di PTSP Transaksi Non Tunai (SE Kemendagri)



TOPIK	HASIL MONEV	REKOMENDASI
PENGADAAN BARANG DAN JASA	<ul style="list-style-type: none"> Sebagian besar Pemda belum memiliki Kode Etik ULP Pokja sebagian masih merangkap dengan SKPD lain 	<ul style="list-style-type: none"> Segera menyusun Kode Etik ULP Membentuk Pokja Mandiri
PENINGKATAN KAPASITAS APIP	<ul style="list-style-type: none"> Sebagian Pemda sudah memiliki Audit Charter, Standar Kompetensi Auditor, Kode Etik Inspektorat Sebagian besar belum Level 3 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan peran APIP dalam rangka pendampingan bagi SKPD (<i>probity audit</i>), pencegahan korupsi Meningkatkan menjadi Level 3
KEPATUHAN GRATIFIKASI DAN LHKPN	<ul style="list-style-type: none"> Pemda sudah memiliki Perwali ttg PPG dan SK Walikota ttg UPG Sudah ada Perwali ttg Pelaporan LHKPN 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi gratifikasi Melaksanakan Bimtek LHKPN Memastikan semua WL telah menyerahkan Form Aktivasi e-Filling LHKPN Meningkatkan tingkat kepatuhan LHKPN



TOPIK	HASIL MONEV	REKOMENDASI
TUNJANGAN PENGHASILAN PEGAWAI	<ul style="list-style-type: none"> Sebagian besar Pemda belum final ANJAB dan ABK Belum ada aplikasi pengukuran kinerja Sebagian besar Pemda belum mengimplementasikan TPP 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya ANJAB dan ABK Menyusun aplikasi penilaian kinerja Mengimplementasikan TPP berbasis kinerja
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	<ul style="list-style-type: none"> Sebagian besar Pemda belum memiliki <i>Road Map IT</i> dan belum memiliki Perkada ttg Tata Kelola E-Gov 	<ul style="list-style-type: none"> Segera memformalkan ketentuan ttg E-Gov Diskominfo menjembatani penyusunan dan integrasi aplikasi terutama <i>e-planning</i>, <i>e-budgeting</i>, perizinan <i>online</i>, pengukuran kinerja.





PEMDA

Toraja Utara

Sidrap

Pangkep

Bone

Maros

Jeneponto

DESA

111

68

65

328

80

82

BELUM IMPLEMENTASI

81

56

65

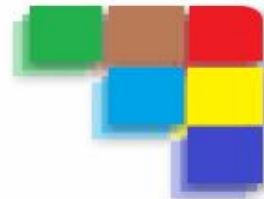
328

2

82

Sumber: BPKP Sulsel





- Sesungguhnya, pada **ranah preventif**, upaya pemberantasan korupsi sangat tergantung pada **kemauan (komitmen) pimpinan pemerintahan (Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota) dan jajarannya.**





Terima Kasih

